

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN APBD 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TA 2024



KATA PENGANTAR

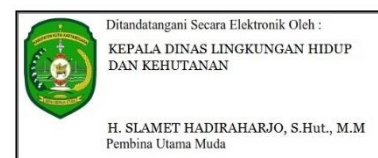
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhana Wata'ala atas berkat dan rahmat-Nya dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 Dinas Hidup dan Kehutanan Kab.Kutai Kartanegara.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2024 sampai dengan triwulan II dan uraian mengenai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Selain itu di dalamnya memuat pula pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Pada tahun 2024 kurang lebih 12 (dua belas) program yang harus dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Beberapa usulan penambahan paket pekerjaan berusaha untuk dimaksimalkan selain bertujuan untuk menambah output pekerjaan berkaitan dengan upaya perbaikan dalam rangka meraih kembali Penghargaan Adipura, juga dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Akhir kata, Semoga apa yang tertuang dalam Renja Perubahan 2024 ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan dalam rangka melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, serta bermanfaat dalam pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 15 Agustus 2024





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai Dengan Triwulan II	7
2.2 Analisi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	19
3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah	19
3.2 Program dan kegiatan	20
BAB IV PENUTUP	34
4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Perubahan.....	34
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	34
4.3 Rencana Tindak Lanjut.....	35





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 merupakan dokumen rencana pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 yang penyusunannya masih berpedoman pada RENSTRA DLHK Tahun 2021 sd 2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan rencana kerja Pemerintah. Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang strategis yaitu untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah daerah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Implementasi Rencana Kerja Perubahan 2024 telah berlangsung hampir 1 (satu) semester. Dalam perjalanannya, pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah memungkinkan tidak berlangsung sesuai dengan rencana, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dst, perubahan RKPD Tahun 2024 dan perubahan Renja 2024 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun atau adanya perkembangan kondisi sebagai berikut :

- (a) Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2024.
- (b) Saldo sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024.



- (c) Adanya penyesuaian atas standar harga yang tertuang dalam SIPD yang berbeda dengan harga kontrak.
- (d) Adanya limpahan dana untuk kebersihan dan pengelolaan persampahan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Mengaju pada ketentuan tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab.Kutai Kartanegara perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam Hal ini Renja Perubahan Tahun 2024, yang dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan sebelumnya dengan melihat kepada kegiatan Prioritas dan seberapa besar progress capaian masing-masing kegiatan apakah dapat memenuhi target atau tidak.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60/MELHKSetjen/2015 Tentang Peran Masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Noor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023;
18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.21 tahun 2012 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
21. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.



1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun *maksud* kegiatan penyusunan Perubahan Renja 2024 adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun *tujuan* kegiatan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab.Kutai Kartanegara adalah :

- ❖ Mengevaluasi terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya sehingga dapat ditentukan apakah program dan kegiatan tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan untuk tahun sebelumnya;
- ❖ Mengumpulkan rancangan/usulan program-program dan kegiatan-kegiatan dari bidang-bidang dalam lingkup kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
- ❖ Memilih, memilah dan menelaah rancangan/usulan program-program dan kegiatan-kegiatan dan disusun berdasarkan skala prioritas;
- ❖ Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada APBD Perubahan Tahun 2024 bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- ❖ Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab.Kutai Kartanegara mengacu kepada Permendagri No.86 Tahun 2017, dengan pokok bahasan Serta susunan garis besar penulisan renja ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD
- 2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap rancangan perubahan RKPD dan Renstra PD Tahun 2023
- 2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini berisi tentang faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan perubahan RKPD/Renstra PD

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja –PD

Dalam kurun waktu Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan 12 (dua belas) Program dan 21 (dua Puluh Satu) kegiatan dan 61 (Enam Puluh Satu) sub kegiatan yang pendanaan berasal dari APBD dan APBN (DAK). Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut tentunya dilakukan untuk menunjang pencapaian atas Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Adapun uraian program yang menjadi kontribusi dari pencapaian Indikator Kinerja Kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin;
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH;
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;



9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
11. Program Pengelolaan Persampahan;
12. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan tersebut dengan pendanaan Rp 119.339.495.250,00 yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada Bulan Juli tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali berikan dana sisa pagu silpa melalui program FCPF (*Forest Carbon Partnership Facility*) berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Nomor: S-6/BPDLH/2023.

Pada Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapat tambahan pagu dari Silpa DLHK sebesar Rp. 389.754.285,00 pelimpahan dana silpa dari OPD Bappeda sebesar Rp. 190.000.000,00 dan dari OPD DPMPTSP Rp. 177.117.000,00 Total Silpa FCPF yang di tambahkan ke DLHK sebesar Rp. 755.071.719 dalam pelaksanaannya disebar dalam 3 (Tiga) Sub Kegiatan, sehingga total Pagu anggaran DLHK Tahun 2024 menjadi Rp 122.692.770.412,00

Sampai dengan semester 1 Tahun 2024 total anggaran yang mampu diserap adalah sebesar Rp 22.797.473.093 atau sebesar 19,1 % dari keseluruhan total anggaran.

Adapun rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja disajikan dalam tabel I .



Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Kutai Kartanegara

TABEL I
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Sasaram/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Terget Kinerja Capaian Program (Renstra -PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2023			Perkiraan realisasi capaian target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2024	
					Target Renja-PD tahun 2023	Realisasi Renja-PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi %	Target Program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan Semester 1 (tahun 2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63,56 Nilai	58,99 Nilai	60,53	89,8	148	60,53	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evlauasi Kinerja Perangkat Daearh	11 Dokumen	11	11	11	100	8	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6	2	2	100	0	70
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5	5	4	80	2	76
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12 Laporan		12	12	100	12	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1260 Orang/Bulan	1176 Orang/Bulan	1232	1040	84,42	810	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16 Laporan	13 Laporan	14	14	100	1	67
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	2 Laporan		2	2	100	2	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	13 Laporan	12	11	91,66	8	45
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3	3	100	3	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Stell	-	-	-	-	0	40
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Laporan	3 Laporan	2	2	100	0	40
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Orang		19	19	100	0	40



**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Kutai Kartanegara**

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen		1	1	100	1	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Jenis	33 Paket	2	2	100	0	24
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	-	-	-		0	20
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.17 Jenis 2.150 Kotak 3.80 Kotak	27 Paket 100 Paket 77 Paket	13	6	46,15	0	20
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1. 3 jenis 2. 5.000 Lembar	6 Paket 19,902 Paket	2	1	50	0	20
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	528 Exemplar	-	4	4	100	-	0
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan	Jenis	Paket	12	6	50	1	40
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Orang	182 Laporan	40	61	152,5	74	40
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12 Paket	3	3	100	0	0
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-				1	26
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	0	25
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	Persen	100	100	100	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Jumlah jenis 2. Jumlah unit	1. Jumlah jenis 2. Jumlah unit	19 Unit	75	75	100	75	25
	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	unit	-	-	-	0	40
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bukan	12	12	100	12	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	70 Rekening	12	12	100	7	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	849 Orang/Bulan	12	12	100	8	70
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	66,5 Persen		60	60	100	64,5	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak	1 Unit	23 Unit	8	11	137,5	1	70
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	20 Unit	18	9	50	0	40
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Unit	1 Gedung	2	2	100	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	uni	1 Unit	-	-	-	0	0



Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara

	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	100 Persen	persen	60	100	166	60	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH	4 Dokumen	dokumen	1	1	100	4	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	3	3	100	1	85
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya KLHS	1 Dokumen		1	1	100	1	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	1. Jumlah Dokumen 2. Jumlah data	1 Dokumen	-	2	2	100	0	90
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	200000 Pohon	Pohon	2000	235106	117,53	200000	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	4	4	100	4	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	4 Dokumen	2	2	100	0	43
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	0	45
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	10 Dokumen	1	1	100	0	55
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Lpaoran	Laporan	1	1	100	1	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	1 Laporan		1	1	100	0	37
	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lahan terkontaminasi yang diisolasi	5 Lokasi	2 Lokasi	25	34	136	9	45
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	50 Lokasi	2 titik	50	43	86	0	48
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 dokumen	Dokumen	1	5	500	1	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1 Dokumen	-	1	1	100	0	0
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1 Dokumen	-	1	1	100	0	0
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen 235.106 Pohon	2	2	100	0	65
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1 Dokumen	-	1	1	100	0	30



**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Kutai Kartanegara**

	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan	20 Persen		20	20	100	20	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kabupaten Kota	24,19 Pesen		2	0	0	25.80	
		Tercapainya penanaman dan pemeliharaan pengelolaan keanekaragaman hayati	Dokumen					2	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen rencana induk pengelolaan Kehati yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	2	0	0	0	0
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati yang dikelola diluar kawasan Hutan	13 Hektar	6 Hektar	317.5	18	5,67	27	36
	pengelolaan kebun raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Hektar		10	0	0	0	10
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan	25 Hektar	44,36 Hektar	329	10	3,03	7	50
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	-		17	12	70,59	0	0
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	3 Dokumen		4	4	100	4	
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha	50 Pelaku Usaha		50	50	100	50	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	50 Laporan	63 Laporan	4	4	100	19	55
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha pengumpul limbah B3	50 Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	50	0	0	50	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	40 Laporan	1 Dokumen	4	4	100	2	43
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	19,32 Persen	Persen	19,32	19,32	100	19.32	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pembinaan/pengawasan yang dilakukan terhadap jumlah izin usaha yang diterbitkan	20 Persen	Persen	20	100	500	20	
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi fungsional PPLHD	9 Orang		9	9	100	10	50
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	120 Laporan	119 Lporan	120	120	100	67	80
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	20 Dokumen	18 Dokumen	20	28	100	0	0
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	120 Dokumen	0	0	0	0	0	1



Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara

	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota	75 Persen	Persen	75	75	100	75	
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota	70 Persen	Persen	75	100	133,33	75	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	5 Dokumen	13 Dokumen	6	5	83,3	0	25
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat	70 Persen	Persen	70	100	142,8	70	
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	1 Dokumen	8 Dokumen	1	1	100	1	75
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/pelatihan/penyuluhan	35 Lembaga	Lembaga	35	35	100	35	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah diklat dan penyuluhan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	35 kali	Kali	35	35	100	35	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/keompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	2 Lembaga	-	2	2	100	0	35
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	53 Dokumen	35 Dokumen	53	53	100	17	63
	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	325 Orang	-	200	241	120,5	0	26
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1. Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama	5 Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	5	21	420	5	
		2. Jumlah Penghargaan Yang Diberikan	129 Penghargaan	Penghargaan	126	126	100	109	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat/Dunia Usaha/Lembaga Lainnya	2 jenis	Jenis	2	5	250	2	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	124 Entitas	3 entitas	178	178	100	92	60
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	98 Persen	Persen	96	96	96	96	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengaduan masyarakat di Bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	50 Laporan	Laporan	50	49	9,8	50	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	26 aDokumen	25	28	112	25	71
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	20 Dokumen	22 Dokumen	25	18	72	18	65



**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Kutai Kartanegara**

	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1. Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun	1 Lokasi	Lokasi	2	2	100	2	
		2. Timbulan sampah	99,52 Persen	Persen	94.84	94.84	100	94.84	
Pengelolaan Sampah		1. Persentase Jumlah sampah yang ditangani	70 Persen	Persen	50	50	100	73	
		2. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	28,30 Pesen	Persen	72	72	100	10.91	
		3. Persentase cakupan area pelayanan	72,22 Persen	Persen	21	21	100	50	
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	3 Dokumen	4 Dokumen	3	3	100	5	5
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah laporan hasil Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 Laporan	11 Laporan	4	4	100	0	0
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	60529,994 Ton	98.224 Ton	60.329,41	78.939,10	130,85	0	0,00
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	5 Kelompok	-	5	5	100	0	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2 Dokumen	-	5	5	100	0	0
	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2 Dokumen	-	3	3	100	0	0
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	19 Unit	92 unit	3.749	3.748	100	0	0
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)	0 Dokumen 1 Kegiatan	Persen	16,67	16,67	100	16.67	
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen	Dokumen	1	0	0	1	
	Penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok TAHURA	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Dokumen	2 Dokumen	1	1	100	0	0



Berdasarkan hasil evaluasi hasil pelaksanaan sampai dengan semester 1 (satu), analisis masing-masing capaian sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dalam pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Semester satu hampir 80% Program yang ada tidak dapat terealisasi sesuai dengan terget yang telah ditetapkan, beberapa program dan kegaitan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Program Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), pada Sub Kegiatan Pengelolaan Kebun Raya Terkait Permasalahan Kewenangan Lahan Area Kebun Raya Lokasi adalah Hibah dari PT. Mega Prima Persada (MPP) di Desa Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu belum selesai.
- b. Program Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH karena Perda Terkait MHA sampai sekarang masih belum di tetapkan di DPR;
- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH belum dapat di laksanakan terkendala belum terbentuknya Tim Uji Kelayakan LH tingkat Kabupaten oleh KLHK (TUK sebagai turunan Lembaga Uji Kelayakan yang belum terbentuk);

2.1.2 Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan

Berakhir pada Triwulan II Tahun 2024, ada beberapa program/kegiatan yang memenuhi target hasil/keluaran yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada Sub Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang - Undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Secara Fisik 2 (Dua) kegiatan yang berada dalam program ini telah terlaksana lebih dari 50 % sesuai dengan target yang ditetapkan.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Sampai dengan triwulan 2 (dua) belum ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapun beberapa faktor penyebab tidak tercapai atau terpenuhinya target hasil sampai dengan triwulan 2 (dua) adalah sebagai berikut :

1. Penerima Manfaat yang bertambah, tidak sesuai dengan yang telah ditargetkan;
2. Kesalahan dalam menetapkan standar harga pada RKA Murni sehingga harga tidak sesuai dan memerlukan penyesuaian melalui pergeseran atau perubahan APBD;
3. Pelaksanaan berbeda dengan Juklak/Juknis;
4. SK yang terlambat sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan;
5. Material yang sulit ditemukan di pasar.



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berisikan capaian kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup; dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), adapun pencapaian IKU berdasarkan Renstra 2021 sd 2026 adalah sebagai berikut :

TABEL 2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR	REALISASI dan PROYEKSI		
						2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72,82	73,14	73,47	73,81	74,15	74,51	74,51	71.77	72.41	72.41
2		Meningkat nya Upaya Pencegahan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	CO2EQ	18.212	18.640	19.085	19.531	19.976	20.394	20.394	18640,78	19085,21	19531,44
			Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	57.22	57.32	57.42	57.52	57.62	57.72	52.72	53.08	50,53	50,53
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	86.68	88.78	88.89	88.89	89.09	89.19	89.19	88.78	91,53	91,53
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	70.26	71.38	72.49	73.89	74.88	76.20	76.20	71.38	74,62	74,62

Sampai dengan semester 1 tahun 2024, Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara belum memenuhi Target Tahunan di 2024, adapun beberapa hal Faktor Penghambat pencapaian antara lain :

- Penurunan rata-rata kualitas air sungai yang dipengaruhi dapat dipengaruhi oleh faktor alam dan meningkatnya kualitas produksi limbah dari aktivitas manusia aktivitas usaha/industri, pengelolaan limbah Rumah Tangga yang



semakin belum terkelola dengan baik.

- b. Terbatas nya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga menjadi kendala Optimalisasi pengawasan pada target Badan Usaha (perusahaan) yang akan diawasi, serta terkendala banyak nya item kriteria Ketaatan yang di keluarkan oleh Kemeterian Lingkungan Hidup yang mengakibatkan masih banyak terdapat Perusahaan yang di nyatakan Tidak Taat.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Visi Bupati dan Wakil Bupati 2021 sd 2026 adalah **“Terwujudnya Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”**.

Berkaitan dengan misi ke-5 **“Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan”** maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai SKPD yang memiliki urusan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan misi dan tujuan tersebut. Strategi untuk mewujudkan tujuan tersebut yakni Implementasi Kajian Lingkungan Hidup, Pengendalian kualitas lingkungan hidup dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah B3 dan Peningkatan Konservasi Sumber daya alam hayati dalam pengelolaan lingkungan hidup .

Adapun Tujuan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2024 bagi setiap bagian dan bidang di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan bidang Lingkungan Hidup di Kutai Kartanegara;
2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksana program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai adalah:



1. Optimalnya peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pencapaian visi dan misi pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
3. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca

Dalam melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengemban tugas untuk mensukseskan pelaksanaan misi ke – 5 (lima) yaitu meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, dengan 3 (tiga) program Utama Dedikasi yaitu :

1. **Program Desa Ramah Lingkungan**, Memberikan insentif bagi desa/kelurahan/RT yang menumbuhkan kebersamaan dalam pengelolaan pembangunan berbasis pelestarian lingkungan, Indikasi kegiatan, yaitu penerapan Desa Ramah Lingkungan (*BioVillage*) minimal 30% dari jumlah desa/kelurahan.
2. **Program Kukar Peduli Lingkungan**, Membangun sistem pengelolaan lingkungan dengan menitik beratkan pada penguatan pengawasan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, Kegiatan Prioritas, yaitu Pembangunan 6 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di lokasi kecamatan prioritas.
3. **Program Dunia Usaha Ramah Lingkungan**, Memperkuat dunia usaha untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan, dengan memperkuat pengawasan AMDAL, dengan memfasilitasi penanaman 1 juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi.

Sebagaimana penjelasan pada Bab sebelumnya, bahwa pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapatkan tambahan pagu dari Silpa Pagu Tahun 2023 sebesar Rp. 755.071.719 yang bersumber dari dana REDD + pada Program FCPF (*Forest Carbon Partnership Facility*). Adapun penggunaan dana tersebut di sebar pada 3 (Tiga) Sub Kegiatan sebagaimana tabel berikut ini :



PELAKSANAAN PROGRAM FCPF APBD PERUBAHAN TAHUN 2024									
NO	SUB KOMPONEN	Program REDD+FCPF-CARBON FUND	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	TARGET	PAGU
1	Pengembangan Mata Pencariahan Alternatif di Luar Kawasan Hutan	Pengembangan model perladangan gilir-balik yang mengintegrasikan pendapatan jangka pendek dan jangka menengah melalui kombinasi tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Penyusunan dokumen dan pengembangan alternatif mata pencarian masyarakat disekitar hutan melalui budidaya kelulut	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang di Kelola Kewenangan Kabupaten/Kota	20,5 Ha	402.501.719,00
	Pengembangan Mata Pencariahan Alternatif di Luar Kawasan Hutan	Pengembangan model perladangan gilir-balik yang mengintegrasikan pendapatan jangka pendek dan jangka menengah melalui kombinasi tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Pengadaan bibit tanaman/Pohon serta Pelaksanaan Penanaman pohon oleh masyarakat di Desa Giri Agung Tenggarong Seberang dan Kota Bangun Desa Sangkulima	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	202.570.000,00
	Kemitraan Konservasi	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam pemanfaatan dan perlindungan kawasan konservasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelatihan bersertifikat Untuk meningkatkan Kapasitas ASN di lingkungan DLHK kab Kutai, di karenakan sampai dengan saat ini blm ada nya ASN yang mahir dan memiliki Sertifikat (PILOT DRONE)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19 Orang	150.000.000,00

Dari tabel di atas, lokasi pelaksanaan ke lima program dan sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan program kegiatan *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) ini tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, terdapat 12 program yang mengalami perubahan pagu dan 21 sub kegiatan yang mengalami pengurangan/penambahan pagu. Selain itu terdapat 2 (Dua) sub kegiatan yang baru dilaksanakan di perubahan 2024.



Jika melihat dari total pagu usulan perubahan 2024 yang direncanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total pagu keseluruhan mengalami peningkatan 33,5 % lebih dibandingkan dengan pagu Murni, yaitu sebelumnya sebesar Rp 119.339.495.250,00 menjadi Rp 122.692.770.412,00 atau naik sebesar Rp 3.353.275.162,00 yang tersebar pada 12 program.

Dalam pelaksanaan paket pekerjaan dalam sub kegiatan tersebut lokasi pelaksanaan sub kegiatan tersebar di beberapa kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara terutama yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran, pengawasan pengendalian pencemaran. beberapa kegiatan yang mengalami pergeseran ataupun perubahan diantaranya, dapat dilihat pada tabel berikut :



Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN	INDIKATOR	RKPD 2024			APBD 2024			Pagu Perubahan	Internalisasi
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sukarama Tenggarong	60,53	18.628.665.432	Sukarama Tenggarong	60,53	24.733.593.442	25.668.346.660,00	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sukarama Tenggarong	9	277.380.000	Sukarama Tenggarong	9	377.380.000	418.380.000,00	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan	Sukarama Tenggarong	3	157.380.000	Sukarama Tenggarong	3	157.380.000	198.380.000	Mendapat tambahan pagu anggaran dari sub kegiatan Pengelolaan kehati d luar kawasan hutan sebesar 39.000.000 dan Sub Pengelolaan Kebun Raya Sebesar 39.000.000
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sukarama Tenggarong	6	120.000.000	Sukarama Tenggarong	6	220.000.000	220.000.000	Target dan pagu sesuai APBD Murni
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Sukarama Tenggarong	12	11.207.137.962	Sukarama Tenggarong	12	17.212.065.972	17.382.146.542	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sukarama Tenggarong	1260	11.002.137.962	Sukarama Tenggarong	1260	17.007.065.972	17.177.146.542	Sudah di sesuaikan dengan rekon bersama BPKAD
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sukarama Tenggarong	14	205.000.000	Sukarama Tenggarong	14	205.000.000	205.000.000	Target dan pagu sesuai APBD Murni
2.11.01.2.03	Adminisitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Sukarama Tenggarong	2	48.880.000	Sukarama Tenggarong	2	48.880.000	70.860.000	
2.11.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sukarama Tenggarong	12	48.880.000	Sukarama Tenggarong	12	48.880.000	70.860.000	Penambahan dari Sub Keg Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebesar 12.830.000 dan sub kegiatan rehab gedung sebesar 9.150.000
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Sukarama Tenggarong	3	785.010.000	Sukarama Tenggarong	3	785.010.000	886.010.000	
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sukarama Tenggarong	326	334.460.000	Sukarama Tenggarong	326	334.460.000	435.460.000	Penambahan dari Sub Keg Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar 101.000.000
2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sukarama Tenggarong	3	50.550.000	Sukarama Tenggarong	3	50.550.000	50.550.000	Target dan pagu sesuai APBD Murni
2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sukarama Tenggarong	40	400.000.000	Sukarama Tenggarong	40	400.000.000	400.000.000	Penurunan Target dimkurangi 150.000.000 dan penambahan dana fcpi sebesar 150.000.000



Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara

2.11.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sukarame Tenggarong	1	1.416.000.000	Sukarame Tenggarong	1	1.416.000.000	1.420.370.000	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sukarame Tenggarong	2	150.000.000	Sukarame Tenggarong	2	150.000.000	150.000.000	Penyesuaian harga ecatalog, sisa pagu anggaran di alihkan ke sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lain nya sebesar 44.871.500
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sukarame Tenggarong	1	30.000.000	Sukarame Tenggarong	1	30.000.000	30.000.000	Target dan pagu sesuai APBD Murni
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sukarame Tenggarong	242	28.000.000	Sukarame Tenggarong	242	28.000.000	28.000.000	Target dan pagu sesuai APBD Murni
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sukarame Tenggarong	2	8.000.000	Sukarame Tenggarong	2	8.000.000	8.000.000	Target dan pagu sesuai APBD Murni
2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Sukarame Tenggarong	4	100.000.000	Sukarame Tenggarong	4	100.000.000	100.000.000	Target dan pagu sesuai APBD Murni
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sukarame Tenggarong	105	500.000.000	Sukarame Tenggarong	105	500.000.000	549.000.000	Penambahan pagu peralihan dari sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar 49.000.000
2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sukarame Tenggarong	1	250.000.000	Sukarame Tenggarong	1	250.000.000	250.000.000	Target dan pagu sesuai APBD Murni
2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sukarame Tenggarong	2	350.000.000	Sukarame Tenggarong	2	350.000.000	265.370.000	Sisa pagu 12.830.000 di alihkan ke sub keg Rekonsiliasi BMD, sisa pagu di alihkan ke dan ke sub keg Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar 71.800.000
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penerangan Bangunan Kantor dan keamanan Instalasi Listrik Kantor							40.000.000	Penambahan dari sub kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar 40.000.000
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Sukarame Tenggarong	12	914.822.950	Sukarame Tenggarong	12	914.822.950	2.169.043.440	
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sukarame Tenggarong	2	600.000.000	Sukarame Tenggarong	2	600.000.000	600.000.000	
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sukarame Tenggarong	20	274.822.950	Sukarame Tenggarong	20	274.822.950	617.993.440	Penambahan pagu dari sub kegiatan Pengawasan sebesar 150.000.000, dari sub kegiatan Tanah air udara 125.000.000, dan dari sub kegiatan KLHS Sebesar 50.390.940 dari sub kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar 17.780.000 dari sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH sebesar 40.000.000 dan sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar 44.871.500 (
2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sukarame Tenggarong	2	40.000.000	Sukarame Tenggarong	2	40.000.000	111.800.000	Penambahan Pagu dari sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebesar 71.800.000
2.11.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	Sukarame Tenggarong	2	-	839.250.000	Pemindahan pagu hasil internalisasi dari sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan



Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara

2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Sukarame Tenggarong	12	2.233.434.520	Sukarame Tenggarong	12	2.233.434.520	2.711.536.678	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sukarame Tenggarong	12	290.052.000	Sukarame Tenggarong	12	290.052.000	429.980.108	Butuh Penambahan Pagu APBDP
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sukarame Tenggarong	12	1.943.382.520	Sukarame Tenggarong	12	1.943.382.520	2.281.556.570	Butuh Penambahan Pagu APBDP
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Sukarame Tenggarong	60	1.746.000.000	Sukarame Tenggarong	60	1.746.000.000	610.000.000	
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Sukarame Tenggarong	8	275.000.000	Sukarame Tenggarong	8	275.000.000	275.000.000	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sukarame Tenggarong	5	1.136.000.000	Sukarame Tenggarong	5	1.136.000.000	-	Perubahan rekening dan tambahan pagu dari sub kegiatan Pengelolaan kehati di luar kawasan hutan sebesar 152.000.000 ndan sub penyediaan sarana adan prasarana Pengelolaan persampahansebesar 1.405.271.000
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sukarame Tenggarong	18	35.000.000	Sukarame Tenggarong	18	35.000.000	35.000.000	
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sukarame Tenggarong	2	300.000.000	Sukarame Tenggarong	2	300.000.000	300.000.000	Pengurangan Anggaran
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	Sukarame Tenggarong	60	960.000.000	Sukarame Tenggarong	60	960.000.000	909.609.060	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH	Sukarame Tenggarong	1	400.000.000	Sukarame Tenggarong	1	400.000.000	349.609.060	
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Sukarame Tenggarong	2	400.000.000	Sukarame Tenggarong	2	400.000.000	349.609.060	Pengurangan Pagu Anggaran Penyesuaian target dan harga di pasaran pagu sebesar 50.390.940 di alihka ke sub kekuatan Pengadaan peralatan dan pelengkapan kantor lainnya untuk pembelian komputer dan AC
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya KLHS	Sukarame Tenggarong	1	560.000.000	Sukarame Tenggarong	1	560.000.000	560.000.000	
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Sukarame Tenggarong	1	560.000.000	Sukarame Tenggarong	1	560.000.000	560.000.000	



Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara

2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghibaan dan reklamasi	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200000	3.354.920.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200000	3.354.920.000	3.767.361.447	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	2.446.920.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	2.446.920.000	2.656.791.447	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	643.920.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	643.920.000	518.290.000	Pagu di alihkan sebesar Rp.125.000.000, ke sekretariat sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lain nya untuk pembelian Komputer bidang 3
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	365.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	365.000.000	365.000.000	Target dan pagu sesuai APBD Murni
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	1.438.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	1.438.000.000	1.773.501.447	Target dan pagu sesuai APBD Murni
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	122.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	122.000.000	122.000.000	
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	45.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	45.000.000	45.000.000	
2.11.03.2.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25	77.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25	77.000.000	77.000.000	
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	786.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	786.000.000	988.570.000	
2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentiya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	300.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	300.000.000	300.000.000	
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	321.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	321.000.000	523.570.000	
2.11.03.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	165.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	165.000.000	165.000.000	Butuh Penambahan Pagu APBDP
2.11.04	Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20	2.275.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20	2.375.000.000	2.387.501.719	
2.11.04.2.01	Pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	2.275.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	2.375.000.000	2.387.501.719	
		Tercapainya Penanaman dan Pemeliharaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50		Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50			
2.11.04.2.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Loa Kulu , Jembayan Tengah	5	635.000.000	Loa Kulu , Jembayan Tengah	5	635.000.000	35.000.000	Penurunan Target, Pagu Anggaran di alihkan ke sub kegiatan Tahura sebesar 197.000.000 , sub kegiatan rth 400.000.000 dan sub kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan PD sebesar 3.000.000
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,5	1.060.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,5	1.060.000.000	1.460.000.000	Penambahan Pagu peralihan anggaran dari Kebun raya sebesar 400.000.000
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26	580.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26	680.000.000	892.501.719	Pengurangan Target pengurangan pagu dan Penambahan pagu fepf sebesar 402.501.719



Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara

2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	375.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4	375.000.000	375.000.000	
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50	75.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50	75.000.000	75.000.000	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	KAB. KUTAI KARTANEGARA	50	75.000.000	KAB. KUTAI KARTANEGARA	50	75.000.000	75.000.000	
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha pengumpul limbah B3	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50	300.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50	300.000.000	300.000.000	
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	300.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	300.000.000	300.000.000	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20	702.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20	702.000.000	491.770.940	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pembinaan/pengawasan yang dilakukan terhadap jumlah izin usaha yang diterbitkan	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20	702.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20	702.000.000	491.770.940	
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120	102.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120	102.000.000		Pagu Anggaran di alihkan ke sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang - Undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	129	350.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	129	350.000.000	241.770.940	Penurunan Target
2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi fungsional PPLHD	Sukarama, Tenggarong	9	250.000.000	Sukarama, Tenggarong	9	250.000.000	250.000.000	



Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara

2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota	Kota Bangun, Tabang, Muara Wis	75	75.000.000	Kota Bangun, Tabang, Muara Wis	75	75.000.000	75.000.000	
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota	Kota Bangun, Tabang, Muara Wis	75	40.000.000	Kota Bangun, Tabang, Muara Wis	75	40.000.000	40.000.000	
2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kota Bangun, Tabang, Muara Wis	6	40.000.000	Kota Bangun, Tabang, Muara Wis	6	40.000.000	40.000.000	Perda Terkait MHA sampai sekarang masih belum keluar masih di DPR
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat	Kota Bangun, Tabang, Muara Wis	70	35.000.000	Kota Bangun, Tabang, Muara Wis	70	35.000.000	35.000.000	
2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Kota Bangun, Tabang, Muara Wis	1	35.000.000	Kota Bangun, Tabang, Muara Wis	1	35.000.000	35.000.000	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/pelatihan/penyuluhan	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35	240.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35	240.000.000	342.000.000	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah diklat dan penyuluhan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35	240.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35	240.000.000	342.000.000	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30	80.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30	80.000.000	182.000.000	Pengalihan dari pagu (Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH) Pemberian Insentif bagi Sekolah yang menerima Adiwiyata tingkat Mandiri dan nasional
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350	80.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350	80.000.000	80.000.000	
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	80.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	80.000.000	80.000.000	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1. Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	650.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	650.000.000	650.000.000	
		2. Jumlah Penghargaan Yang Diberikan		128			128			
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan lingkungan hidup dan menindaklanjuti penanganan penyelesaian pengaduan/sengketa lingkungan	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	650.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	650.000.000	650.000.000	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	131 unit/entitas	650.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	131 unit/entitas	650.000.000	650.000.000	Memaksimalkan Anggaran di internal



Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara

2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97	288.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97	288.000.000	288.000.000	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Yang Ditindaklanjuti	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40	288.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40	288.000.000	288.000.000	
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20	100.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20	100.000.000	100.000.000	
2.11.10.2.01.0006	Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administrasi yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dammenjadi kewenangan Kabupaten / kota	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20	188.000.000	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20	188.000.000	188.000.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1. Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun 2. Timbulan sampah	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 97,64	85.890.081.808	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 97,64	85.435.981.808	87.391.180.586	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	1. Persentase cakupan area pelayanan 2. Persentase Jumlah sampah yang ditangani 3. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,11 72 24,56	85.890.081.808	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,11 72 24,56	85.435.981.808	87.391.180.586	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	400.000.000,00	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	400.000.000	400.000.000	
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6	3.400.000.000,00	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6	3.400.000.000	3.400.000.000	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5973	39.460.809.808,00	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5973	39.006.709.808	39.006.709.808	Pengurangan Pagu Anggaran Penyesuaian Harga di pasaran, pagu 1.794.194.298 di alihkan ke sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Jabatan dan Operasional sebesar 1.500.000.000 dan sub Penangan Sampah sebesar 294.194.298
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	380.000.000,00	Kabupaten Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	380.000.000	380.000.000	
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	KAB. KUTAI KARTANEGARA	60865,6	27.749.272.000,00	KAB. KUTAI KARTANEGARA	60865,6	27.749.272.000	29.704.470.778	Mendapatkan pagu peralihan internalisasi dari sub kegiatan Penyediaan Sapras Pengelolaan sampah sebesar 388.923.298 dan sub keg pengurangan sampah sebesar 161.004.480 (dan Masih Membutuhkan dana Tambahan sebesar 1.405.271.000)
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Muara Muntai , Tenggarong , Muara Kaman , Sanga Sanga , Muara Wis	1	14.300.000.000,00	Muara Muntai , Tenggarong , Muara Kaman , Sanga Sanga , Muara Wis	1	14.300.000.000	14.300.000.000	Penyesuaian Harga di pasaran, pagu 161.004.480 di alihkan ke sub kegiatan Penangan Sampah
2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Tenggarong	2	200.000.000,00	Tenggarong	2	200.000.000	200.000.000	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)	Kembang Janggut , Muara Kaman	16,67	150.000.000	Kembang Janggut , Muara Kaman	16,67	150.000.000	347.000.000	
3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Kembang Janggut , Muara Kaman	1	150.000.000	Kembang Janggut , Muara Kaman	1	150.000.000	347.000.000	
3.28.04.2.01.10	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Kembang Janggut , Muara Kaman	1	150.000.000,00	Kembang Janggut , Muara Kaman	1	150.000.000	347.000.000	Mendapat Penambahan Pagu dari Sub Kegiatan Kebun Raya sebesar 197.000.000 untuk pembuatan Honorarium Tenaga Ahli
JUMLAH					113.588.667.240,00			119.339.495.250,00	122.692.770.412	



Jika melihat dari tabel 5 Di atas, penambahan maupun pengurangan pagu tersebar ke dalam 12 program di antaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada APBD Murni Program ini melaksanakan 26 Sub Kegiatan dan pada APBD Perubahan bertambah 2 sub kegiatan baru dan 1 sub kegiatan yang di Nol (0) kan dan di geser ke sub kegiatan baru. Selain penambahan sub kegiatan baru , beberapa sub kegiatan juga mengalami kenaikan pagu. Perubahan pagu tersebut antara lain disebabkan oleh :

- a) Kenaikan pada pagu Gaji dan tunjangan tahun 2024 mengalami kenaikan untuk mengkomodir besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban Kerja yang mengalami kenaikan besaran mengikuti Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara
- b) Kebutuhan akan sarana dan prasarana kantor , peralatan kerja, dan kondisi bangunan serta peralatan kerja yang memerlukan pemeliharaan dan pengadaan baru yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Baramg Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) Perubahan Tahun 2023.
- c) Penambahan pagu untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi ASN di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyesuaikan dengan terget pada perjanjian Kinerja Esselon 2.
- d) Kenaikan pada pagu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di karenakan Kurangnya Anggaran karena adanya kenaikan Tarif dasar PDAM dan Penambahan Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Internet dikantor Kebersihan, TPA Bekotok, dan Taman-Taman yang dikelola oleh DLHK





Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara

- e) Kenaikan pada pagu Gaji Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di karenakan kurang nya Anggaran Karena adanya penambahan personil peralihan dari dispermim, kekurangan Anggaran Gaji Laboratorium, Kekurangan BPJS, JKK, JKM tenaga THL.
- f) Kenaikan pagu pada Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah di karenakan kurangnya perhitungan terhadap Pagu untuk gaji PHL Tenaga Kebersihan maupun Pemeliharaan Kendaraan Operasional Alat Angkut sampah, serta keikutsertaan PHL sebagai anggota BPJS (Jaminana Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan) .





2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Pada Program ini terjadi Pengurangan pagu internalisasi dan di alihkan ke sekretariat untuk mengkomodir/ kebutuhan akan sarana dan prasarana kantor, seperti Komputer, printer dan Ac, masih kurang.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kenaikan Pagu pada Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota untuk kebutuhan Pemeliharaan dan pembelian alat uji emisi kendaraan bermotor, serta penambahan pagu dan pagu dana BLUD Laboratorium DLHK sebesar Rp. 137.463.973,00.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) tidak ada penambahan pagu akan tetapi melaksanakan internalisasi pengurangan dan penambahan dalam beberapa sub kegiatan.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), melaksanakan internalisasi pergeseran pagu karena Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH belum dapat di laksanakan karena belum terbentuknya Tim Uji Kelayakan LH tingkat Kabupaten oleh KLHK (TUK sebagai turunan Lembaga Uji Kelayakan yang belum terbentuk).

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Penambahan pagu internalisasi pada Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup, untuk mengakomodir kekurangan anggaran Pemberian Insentif bagi Sekolah yang meneirma Adiwiyata tingkat Mandiri dan nasional.



Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara

7. Program Pengelolaan Persampahan

Penambahan pagu terbesar terdapat pada program pengelolaan persampahan ini, pada Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah untuk mengakomodir kekurangan perhitungan terhadap Pagu untuk gaji PHL Tenaga Kebersihan maupun Pemeliharaan Kendaraan Operasional Alat Angkut sampah, serta keikutsertaan PHL sebagai anggota BPJS (Jaminana Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan).

8. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Penambahan Pagu dari Internalisasi untuk mengakomodir kekurangan anggaran honorarium Tenaga ahli untuk membuat kajian Tahura.





BAB IV PENUTUP

4.1 CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA PERUBAHAN

Dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan, seluruh perubahan yang terjadi dalam program/kegiatan Tahun 2024 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir Tahun 2024. Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat mempedomani isi dokumen Perubahan Renja SKPD Tahun 2024 ini dengan sebaik-baiknya.

4.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, harus dilaksanakan secara





konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang;

2. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 masih belum sempurna. Sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri 86 Tahun 2017, baik dari sisi pemahaman aturan maupun tata cara penyusunan Renja Perubahan.
3. Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, maupun APBD Provinsi.
4. Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya di antaranya (Renja Tahunan, Renstra PD, RKPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten)
5. Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Optimalisasi sumber daya yang dimiliki dalam rangka pencapaian tujuan perangkat daerah merupakan hal utama yang harus dilakukan. Beberapa langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain :

1. Membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan Instansi Vertikal maupun Perangkat Daerah lainnya yang berhubungan langsung dengan pencapaian hasil/keluaran program dan kegiatan, terutama yang menjadi prioritas pada Program Kukar Idaman;





Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Mempedomani Rencana Kerja dan Target kerja agar mampu mengukur atau mengevaluasi capaian dengan baik;
3. Perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), upaya yang ditempuh melalui pendidikan formal, Bimtek, Pelatihan, Seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja Aparatur;
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya dan berhasil guna;
5. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila mengaju pada jadwal yang ditetapkan.
6. Melakukan persiapan percepatan pelaksanaan kegiatan se dini mungkin dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku dan target yang telah ditetapkan dalam pencapaian perencanaan RKPD Perubahan 2024.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

H. SLAMET HADIRAHARJO, S.Hut., M.M
Pembina Utama Muda



